

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

DKI Bangun Rusun bagi Warga Kampung Bayam

Untuk sementara, warga dapat tinggal di rusun Rusun Nagrak atau Pasar Rumput. Warga dipersilakan memilih.

JAKARTA - Untuk menyelesaikan kasus warga eks Kampung Bayam yang berlaut-larut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengambil jalan pintas. Pemprov berencana membangun rumah susun (rusun) baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk menampung warga eks Kampung Bayam.

"Sudah sebulan sejak akhir tahun, kami terus berdiskusi dengan Asisten Pembangunan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Maka dari itu, pemerintah daerah akan membangun rumah susun di sekitar Kecamatan Priok mulai tahun depan," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi

Hartono, di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu.

Rusun baru yang akan dibangun nanti memiliki 150 sampai 200 unit. Heru menegaskan, Pemprov terus berupaya memberikan solusi terbaik. Pemprov mengklaim tidak pernah mengabaikan nasib warga eks Kampung Bayam.

"Jadi, saya tegaskan sekali lagi, Gubernur DKI tidak mengabaikan. Saya akan memberikan yang terbaik, hanya harus berpikir. Saya sudah mendengarkan keluhan," tandas Heru, dikutip *Antara*. Dia mengatakan, kalau rusun dibangun di Nagrak, untkin dinilai agak jauh. Heru minta mereka bersabar.

Lebih lanjut, Heru menyebutkan, sambil menunggu pembangunan rusun Tanjung Priok selesai, warga yang masih menempati Kampung Susun Bayam dapat pindah ke Rusun Nagrak atau Pasar Rumput. "Sambil menunggu, silakan warga memilih tempat yang diinginkan. Bisa ke rusun Nagrak

atau Pasar Rumput," ucap Heru.

Sebelumnya, Manajemen PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah melaporkan oknum eks warga Kampung Bayam ke Polres Metro Jakarta Utara. Oknum warga yang dilaporkan disebut secara berkelompok memasuki pekarangan hunian pekerja pendukung operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS), tanpa izin perusahaan. Hal itu terjadi antara 29 November 2023 hingga awal Desember 2023.

Warga Kampung Bayam menjadi korban pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) era gubernur Anies Baswedan. Nasib mereka hingga kini terus terkatung-katung karena semasa memimpin Jakarta, Anies belum menyelesaikan kasus warga Kampung Bayam yang digusur karena lahannya untuk membangun JIS.

Tak Efektif

Namun, menurut anggota Komisi B DPRD Jakarta, Gilbert Simanjuntak, pembangunan rusun baru bagi war-

ga eks Kampung Bayam tak efektif. Sebab masih memerlukan waktu cukup panjang bagi mereka untuk menemukannya. "Tentu pembangunan rusun baru akan makan waktu karena baru dimulai tahun depan," kata Gilbert.

Dia mengaku tidak mengerti Heru Budi Hartono mengambil keputusan tersebut. Menurut Gilbert, pembangunan rusun baru hanya membuat masalah semakin bertele-tele. Padahal kualifikasi maupun peruntukan sudah ditetapkan.

"Kualifikasi rusun Kampung Susun Bayam tentu ada dan peruntukannya sudah ditetapkan. Itu harus konsisten," tambahnya. Dia menilai pembangunan rusun baru tidak urgen. Sebab masyarakat sudah menerima uang kompensasi dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Kompensasi atau ganti rugi tersebut juga merupakan hasil musyawarah secara berkelompok dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam. Maka, dia berharap

persoalan mengenai warga eks Kampung Bayam ini bisa selesai dengan solusi pasti. "Bila kasus ini semakin lama, akan tambah rumit, apalagi di musim kampanye," katanya.

Sedangkan anggota DPRD lainnya, Ahmad Mardono, minta Pemerintah Provinsi untuk melakukan pendekatan kekeluargaan kepada warga Kampung Bayam guna menyelesaikan masalahnya. Ahmad menegaskan pendekatan kekeluargaan penting dilakukan untuk mencegah permasalahan meluas menjadi problem sosial dan politik.

Apalagi, sebanyak 64 warga Kampung Bayam adalah anak-anak di bawah umur. Mereka masih sekolah. Maka, fisik dan mentalnya harus dijaga. "Warga yang berupaya memperjuangkan haknya, kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Aliran listrik pun dimatikan," jelasnya. Mereka dijanjikan mendapatkan haknya Desember 2023. Untuk itu Jakpro dan Pemprov harus memenuhinya. ■wid/G-1